

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

HALAMAN PERNYATAAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL ix

INTISARI..... x

ABSTRACT..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian..... 12

E. Keaslian Penelitian..... 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan..... 19

1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 23

2. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan 27

B. Materi Muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh 31

C. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh..... 36

1. Komisi Independen Pemilihan (KIP)	36
2. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)	43
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	51
D. Harmonisasi Hukum Pemilu	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian	60
B. Jenis Data dan Bahan Hukum	61
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	64
D. Analisis Data	65
E. Jalannya Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum UU Pemilu Mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UUPA	69
1. Dinamika Pencabutan	69
2. Landasan Hukum Pencabutan	91
B. Implikasi Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2) dan (4) UUPA terhadap Keberlakuan UUPA	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA	139
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kewenangan Pemerintahan Aceh	32
Tabel 2.2. Perbedaan antara Panwaslih dengan Bawaslu	53
Tabel 4.1. Perbedaan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Aceh Sebelum dan Sesudah Pencabutan	74